

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Setelah Republik Rakyat Tiongkok memproklamkan kemerdekaan menjadi negara komunis pada tanggal 1 Oktober 1949, sebagaimana lahirnya suatu negara baru Tiongkok berusaha memfokuskan perhatiannya kepada keutuhan wilayahnya, kekuasaan, konsolidasi serta pencegahan bahaya dari dalam maupun luar negeri. Menurut tata dunia ideal Tiongkok Modern, Taiwan, Xinjiang, dan Tibet adalah wilayah yang dianggap sebagai wilayah kepentingan nasional yang sangat penting dan harus dipertahankan dengan cara apapun (Mubarak, 2007, hlm. 3).

Xinjiang yang sebagai wilayahnya menyimpan banyak sumber daya alam dan berlokasi strategis, berbatasan dengan delapan negara. Sejak berdirinya Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1949, secara resmi mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah Tiongkok dan telah mempercepat upaya untuk sepenuhnya mengintegrasikan Xinjiang dan mencapai kepentingannya.

Xinjiang adalah kampung para muslim di Tiongkok hampir separuh penduduknya merupakan Suku Uighur dari Turki. Ditambah lagi Kazakh dan Hui. Mereka penganut Islam yang taat dan dikenal saleh. Wilayahnya luas hampir seperenam wilayah Tiongkok atau kira-kira seluas Iran. Namun, tanah seluas 1,6 juta meter persegi itu tak semuanya bisa dihuni manusia. Hanya sekitar seperempat wilayah saja yang bisa didiami manusia sisanya gurun gersang gurun taklamakan. Tapi jangan salah, tanah Xianjing ini kaya raya, di balik gurun gersang itu terkandung minyak, gas alam, dan batu bara. Cadangan minyak diperkirakan antara 20-40 miliar ton, atau sekitar 20 persen cadangan minyak Tiongkok. Gas alam sedikitnya 12,4 triliun kaki kubik. Seperti yang dinyatakan Nicolas Becquelin, (2004, hlm.359).

The XUAR is abundant in oil, natural gas, and coal resources and it is the only province that has GDP capita higher than the national average

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS
TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Provinsi Xinjiang secara ekonomi memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Cengkeraman Tiongkok di Xinjiang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Tiongkok melakukan berbagai reformasi sosial dan politik sesuai dengan cita-cita komunisnya yang akan mewujudkan cita-citanya sebagai masyarakat sosialis, Tiongkok telah memodifikasi berbagai kegiatan keagamaan yang ditoleransi, dan mengubah struktur kehidupan beragama di Xinjiang. Dalam hal ini, negara komunis mendukung sistem representasi ideologis dan nilai-nilai ateis yang merusak tatanan dan sistem representasi yang telah berlaku di dalam masyarakat Muslim Xinjiang.

Pada awal pemerintahan Tiongkok dibawah pemerintahan Mao, Tiongkok membuat beberapa kebijakan ekonomi yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat di Tiongkok termasuk Xinjiang yang dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang melemahkan basis sosial-ekonomi dan simbolis mereka sebagai umat muslim, beberapa elit Islam terus bertarung, atas nama Islam, klaim komunis Tiongkok atas wilayah tersebut. Tetapi mulai tahun 1950 Tiongkok harus mengadopsi sikap yang relatif damai terhadap agama untuk mengumpulkan cukup dukungan rakyat untuk membangun otoritasnya. Tentu saja tokoh agama kontra revolusioner yang terang-terangan dibersihkan selama kampanye Tiga anti dan Lima anti (Castet, 2015, hlm. 228) ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mao. Tetapi, seperti di seluruh Tiongkok, pihak berwenang masih mengizinkan pendidikan Islam, dan praktik keagamaan di masjid.

Pada awal 1950-an, Tiongkok menerapkan kebijakan di seluruh China yang dirancang untuk memutus ikatan ketergantungan ekonomi yang mengikat massa pada elit agama khususnya di Xinjiang. Faktanya, elit-elit Islam memainkan peran kunci dalam kehidupan oasis Xinjiang berkat wakaf (harta abadi Islam yang disimpan dalam kepercayaan dan digunakan untuk tujuan amal atau keagamaan) properti yang mereka kelola, tanah pertanian mereka memiliki, dan pajak yang mereka kumpulkan. Beijing melarang lembaga-lembaga keagamaan menahan pajak dan secara progresif menghilangkan kekuatan ekonomi para elit Islam melalui langkah-langkah yang bertujuan untuk

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mendistribusikan kembali warisan properti. Dengan UU Reformasi Agraria Juni 1950 atau sejalan dengan kebijakannya yaitu Kebijakan *landreform* di Tiongkok serta berlandaskan pada peraturan 28 Juni 1950 mengenai hukum penertiban tanah. Diikuti oleh kolektivisasi pada pertengahan 1950-an, wakaf masjid, *xaniqä* (hotel Sufi), mazar (makam atau tempat suci), dan barang-barang pribadi dari elit lokal adalah didistribusikan dan dinasionalisasi diberikan kepada pemerintah. Selain itu dikeluarkan juga undang-undang untuk mereformasi manajemen agama-agama minoritas nasional mulai berlaku pada tahun 1958. Undang-undang itu membenarkan pembongkaran sistem masjid otonom dan properti-properti mewah yang dimiliki oleh ulama (Castets, 2015, hlm.228).

Setelah kehilangan sumber pendapatan mereka, para elit agama kehilangan kekuatan ekonomi mereka dan dengan demikian pengaruhnya terhadap orang-orang yang pendapatannya tergantung pada pemerintah. Pada gilirannya, para elit ini menjadi tergantung pada manfaat yang didistribusikan oleh negara Tiongkok, dan negara hanya memberi kompensasi kepada para ulama yang paling berdamai. Tidak hanya itu etnis Uighur pun harus dihadapkan dengan masuknya migrasi Han ke Xinjiang secara besar-besaran mereka harus bersaing secara ekonomi terutama dalam hal mata pencaharian dengan mereka, Tiongkok mengirim Suku Han ke Xinjiang secara besar-besaran untuk mengimbangi populasi penduduk pemeluk Islam pada perkembangan selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Clarke (2015, hlm.129)

Since the 1980's, China has also sought modernization in Xinjiang. Research notes that modernization development projects in Xinjiang have included renovation of urban hubs that are centers of traditional Uighur culture. This not only destroyed traditional culture, but also displaced thousands of Uighurs and influenced mass Han migration to the region.

Namun sebenarnya migrasi Han awal menurut penelitian Fan and Howell (2011, hlm.119) berawal dari 1950, migrasi ini sengaja dirancang oleh pemerintah Tiongkok pada awalnya kebijakan Selama tahun 1950-an dan 1960-an ini untuk mengkonsolidasikan perbatasan dengan serangan kemungkinan ancaman militer

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari Soviet ,terutama setelah perselisihan antara Tiongkok dan Rusia sebelumnya Uni Soviet, pemerintah Cina secara aktif memindahkan Cina Han ke provinsi perbatasan seperti Xinjiang, Mongolia Dalam, dan Heilongjiang. Selain itu dalam artikel yang ditulis oleh Howell dan Fan (2011, hlm.120) Migran Han dikirim untuk bergabung dengan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), juga disebut sebagai Bantuan, yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. (XPCC adalah unit paramiliter yang dibuat pada tahun 1954 dengan mandat untuk membantu membangun pertanian dan kota-kota dan untuk mendorong aliran Cina Han yang diarahkan oleh negara ke daerah tersebut. Selain migrasi Han yang insentif, pemerintah Tiongkok juga berinvestasi dalam renovasi infrastruktur Xinjiang yang menghancurkan arsitektur tradisional Turki. Ada juga investasi yang dituangkan dalam pengembangan pipa minyak dan gas yang terhubung ke Asia Tengah (Tukmadiyeva,2013, hlm. 87). walaupun pada perkembangan selanjutnya migrasi ini semakin banyak arus migran yang diinisiasi sendiri. Lonjakan migran yang diinisiasi sendiri ke Xinjiang adalah sebagian karena reformasi ekonomi dan relaksasi kontrol migrasi dan sebagian kebijakan pembangunan daerah. Pertama, reformasi ekonomi China, yang dimulai pada akhir 1970-an, mulai menciptakan lapangan kerja baru secara massal di kota-kota dan terutama di wilayah pesisir timur.Perkembangan ekonomi lebih lanjut ini telah menjadi mekanisme pemerintah untuk menekan kerusuhan etnis Uighur sambil memperkuat keamanan dan kerja sama dengan Asia Tengah dan negara-negara perbatasan lainnya (Clarke, 2005, hal. 128).

Meskipun demikian, strategi-strategi yang ditetapkan untuk menenangkan api ini malah memicu lebih parah kekacauan, yang mengakibatkan timbulnya separatisme Uighur di provinsi Xinjiang. Tiongkok melakukan modernisasi di Xinjiang para peneliti mencatat bahwa proyek-proyek pembangunan modernisasi di Xinjiang telah mencakup renovasi pusat-pusat kota yang merupakan pusat budaya tradisional Uighur. Ini tidak hanya menghancurkan budaya tradisional, tetapi juga menggusur ribuan warga Uighur dan memengaruhi migrasi massal Han ke wilayah tersebut. Hingga kini, Suku Han di Xinjiang jumlahnya sekitar 41

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

persen. Dua persen lebih sedikit dari Suku Uighur. Kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur membuat kehidupan mereka dipenuhi dengan pelanggaran atas hak asasi yang mereka miliki, termasuk hak sipil. Meskipun pemerintah Tiongkok mendeklarasikan Xinjiang sebagai daerah yang otonom, namun dalam prakteknya kehidupan rakyat di Xinjiang dikontrol dengan ketat etnis Uighur juga mendapat perlakuan diskriminatif baik dari segi ekonomi maupun dengan kebebasan beragama. Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan yang berdimensi sosial, politik, kebudayaan diawali dengan melakukannya migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang, kebijakan keluarga berencana, kebijakan bahasa Mandarin ataupun kebijakan kontraterorisme yang bersifat *hard approach* seperti kebijakan Kampanye Serangan Keras yang digunakan dalam merespon gerakan bersenjata Uighur (Wibisono, 2017, hlm 2).

Kebijakan pemerintah Tiongkok terkait dengan kebebasan beragama sedikit melonggar ketika Deng Xiao Ping berkuasa pada era 1970 sampai dengan 1980-an. Namun Tiongkok kembali menerapkan kebijakan keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai “*religious extremist*”. Kebijakan ini dikenal dengan “*strike hard policy*” atau gebuk keras. Pada tahun 1996, pemerintah pusat Tiongkok menginstruksikan pemerintah Xinjiang untuk memperketat kebijakan terhadap hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Tercatat pada Tahun 1996 Presiden Tiongkok Jiang Zemin menyatakan bahwa organisasi apapun yang mendukung gerakan separatism dari Muslim Uighur tidak akan ditolerir dengan membuat kebijakan “*Strike Hard*”. Kebijakan ini mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang dicurigai dan tidak menerbitkan paspor dan menahan orang-orang yang didicurigai mendukung separatis dan anggota keluarga mereka. Pada tahun 1997 Pemerintah Tiongkok memerintahkan pasukan militernya menembaki ratusan warga muslim hingga tewas, serta menahan ribuan muslim Uighur karena mereka protes akan kebijakan pemerintah yang represif terhadap muslim Uighur. Peristiwa kejahatan itu berlanjut sampai saat ini yang menimpa Muslim Uighur di Tiongkok telah menjurus kepada Genosida, usaha

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS
TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan kebijakan Pemerintah Tiongkok yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Adapun kebijakan Go West Policy pada tahun 2000 yang mendorong semakin banyaknya pelanggaran HAM terjadi di Xinjiang (Karisma, 2007, hlm, 47).

Sampai saat ini, kebijakan diskriminatif pemerintah Tiongkok terhadap kebebasan beragama di Xinjiang masih terus diterapkan. Terlebih pasca kerusuhan etnis yang terjadi di Urumqi pada tahun 2009, para pemimpin agama Islam di Xinjiang atau Imam, diharuskan untuk menjalani sertifikasi oleh pemerintah Tiongkok, dan diwajibkan hadir didalam pertemuan bulanan dengan utusan dari Biro Urusan Keagamaan dan Biro Keamanan Publik untuk diberi semacam “nasihat”. Sekolah-sekolah agama yang dianggap berbahaya ditutup. Para siswa sekolah dilarang untuk sholat berjamaah, dan dibentuk suatu sistem untuk memonitor isi ceramah khatib ketika sholat Jum’at diadakan.

Dilihat dari pemaparan di atas konflik di Xinjiang ini berawal dari adanya keinginan kebebasan etnis Uighur terhadap pemerintah Tiongkok. Adanya kepentingan pemerintah Tiongkok terhadap wilayah Xinjiang meliputi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membuat Tiongkok bersitegang untuk tetap mempertahankan Xinjiang sebagai daerah otonom Tiongkok. Akan tetapi dilain pihak, pemerintah Tiongkok tetap memperlakukan etnis Uighur dengan perlakuan yang tidak adil dengan perlakuan pemerintah terhadap etnis Han di Xinjiang. Sebagai kelompok minoritas, Uighur menuntut keadilan dan hak-hak hidup mereka diakui termasuk hak dasar mereka yang berkaitan dengan adanya kebebasan beragama. Tetapi, pemerintah Tiongkok menolak dan melakukan tindakan represif dengan menggunakan pendekatan militer. Karena adanya diskriminasi yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, etnis Uighur mengadakan berbagai bentuk perlawanan sebagai respon atas perlakuan, penindasan dari pemerintah yang dirasa sangat tidak adil serta merugikan etnis Uighur (Adawiyah, 2010, hlm 4).

Hingga Pada 2014, orang-orang Uighur di stasiun kereta api di kota Kunming, Yunnan, melakukan serangan pisau massal yang mengakibatkan

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kematian 29 orang dan 130 orang luka-luka. Ini merupakan salah satu kasus atau insiden protes perlawanan yang begitu besar, walaupun insiden protes pada tahun sebelumnya Uighur pernah melakukan protes dengan menggunakan bom kecil rakitan. Setelah kejadian ini ada beberapa insiden Uighur lain yang melibatkan penggunaan pisau. Setahun setelah insiden di Kunming, 50 orang tewas dalam serangan pisau di tambang batu bara di prefektur Aksu, Xinjiang. Sembilan orang Uighur dituduh melakukan serangan dan mereka yang menjadi korban termasuk petugas polisi, penjaga keamanan, dan penambang lainnya, terutama keturunan Cina Han (Radio Free Asia, 2015)

Serangan yang dilakukan dengan menggunakan pisau jelas menunjukkan ketegangan dari Uighur mencapai titik puncak kekerasan. Penggunaan senjata oleh orang Uighur dalam protes dan serangan mereka pada dasarnya belum pernah terjadi karena sulitnya mendapatkan persenjataan seperti itu. Orang Uighur juga menggunakan bom rakitan, tetapi pisau tentu saja merupakan senjata yang paling sering digunakan di sebagian besar wabah kekerasan. Meskipun ini hanya bisa dikaitkan dengan fakta bahwa itu jauh lebih mudah diperoleh sebagai senjata, pisau juga mungkin memiliki ikatan budaya yang lebih dekat. Secara tradisional, pandai besi alat-alat pertanian dan rumah seperti kapak dan pisau telah menjadi praktik umum dan simbol budaya Uighur (Karimova, 2016, hlm. 9). Sementara kekerasan keras yang telah dilakukan oleh beberapa orang Uighur dan kematian yang diakibatkannya ini merupakan bentuk protes atau perlawanan yang dilakukan akibat kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada etnis Uighur.

Antara tahun 2001 dan 2005, organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa Tiongkok menerapkan amandemen yang mengakibatkan penangkapan ribuan warga Uighur atas kejahatan 'kegiatan keagamaan ilegal', 'pengajaran Alquran', 'pelanggaran politik' dan kegiatan lain yang dilakukan negara. dikriminalisasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (Clarke, , 2010, hal. 550-551). Sehingga orang Uighur melakukan protes atau perlawanannya dengan adanya perlawanan serangan pisau kereta Kunming 2014 di provinsi Yunnan, RRC meluncurkan kampanye yang mengerahkan lebih banyak pasukan keamanan

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ke Xinjiang dan meningkatkan penahanan dan pembunuhan Uighur yang diduga terkait dengan kegiatan teroris (Human Rights Watch , 2015). Selain itu, pemerintah telah sering membantah kartu dokumentasi dan identifikasi yang memungkinkan Uighur bepergian ke luar Xinjiang. Baru-baru ini, pihak berwenang China telah mulai secara khusus menyita paspor dari semua warga Uighur Xinjiang untuk mencegah penyebaran terorisme (BBC, 2016, hlm.34).

Berdasarkan pemaparan di atas, timbul suatu rasa keresahan dari peneliti mengenai beberapa hal berikut yang pertama terjadinya gesekan atau konflik penindasan atau diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap umat muslim di Xinjiang yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat dunia. Sehingga bukan tidak mungkin permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sorotan dunia, karena kedudukan masalah dalam sejarah sangat penting terutama bagi Sejarah Asia khususnya di Asia Timur. Kemudian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk apa pemerintah komunis Tiongkok mengeluarkan kebijakan kebijakan dan peraturan yang membatasi kehidupan umat muslim di Xinjiang baik dari segi agama maupun sosial politik?. Apakah kebijakan tersebut bisa memecahkan suatu permasalahan? Atau malah adanya suatu respon perlawanan dari umat muslim di Xinjiang? Sehingga membuat semakin mempersulit kedua belah pihak terkait? Dan bagaimana umat muslim di Xijiang dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut?. Untuk mengkaji permasalahan tersebut diperlukan pendekatan Interdisipliner yang melihat masalahnya dari berbagai sudut pandang. Adapun dengan adanya pernyataan dan pertanyaan di atas tersebut menjadi satu alasan peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Umat Muslim di Xinjiang dalam meghadapi kebijakan politik pemerintah komunis Tiongkok 1950-2014 (kajian konflik etnis Uighur).**

Sedangkan alasan lain peneliti mengangkat judul penelitian dari tahun 1950, pada tahun 1950 Pemerintah Tiongkok membuat suatu kebijakan ekonomi yaitu Kebijakan *landreform* yang berlandaskan pada peraturan 28 Juni 1950 mengenai hukum penertiban tanah dan juga dikeluarkannya UU Reformasi Agraria Juni

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1950 bahwa pemerintah Tiongkok melakukan Nasionalisasi Tanah artinya properti yang umat muslim Uighur kelola, tanah pertanian yang mereka memiliki, dan pajak yang mereka kumpulkan harus diserahkan kepada pemerintah. Diikuti oleh kolektivisasi pada pertengahan 1950-an, wakaf masjid, xaniqä (hotel Sufi), mazar (makam atau tempat suci), dan barang-barang pribadi dari elit lokal adalah didistribusikan dan dinasionalisasi. Setelah kehilangan sumber pendapatan mereka, para elit agama kehilangan kekuatan ekonomi mereka dan dengan demikian pengaruhnya terhadap orang-orang yang pendapatannya tergantung pada pemerintah. Pada gilirannya, para elit ini menjadi tergantung pada manfaat yang didistribusikan oleh negara Tiongkok, dan negara hanya memberi kompensasi kepada para ulama yang paling berdamai. Tidak hanya itu etnis Uighur pun harus dihadapkan dengan masuknya migrasi Han ke Xinjiang secara besar-besaran mereka harus bersaing secara ekonomi terutama dalam hal mata pencaharian dengan mereka dan seringnya terjadi diskriminasi antara umat muslim dan para migrasi Han.

Sementara tahun 2014 dipilih sebagai akhir dari pembahasan karena dilatar belakangi pada tahun sebelumnya yang sudah dijelaskan diatas Tiongkok mengeluarkan amandemen yang mengakibatkan penangkapan ribuan warga Uighur atas kejahatan 'kegiatan keagamaan ilegal', 'pengajaran Alquran', 'pelanggaran politik' dan kegiatan lain yang dilakukan negara. Sehingga orang Uighur melakukan protes atau perlawanannya dengan adanya perlawanan serangan pisau kereta Kunming 2014 di provinsi Yunnan pada tahun tersebut etnis Uighur melakukan protes atau perlawanan kepada pemerintah Tiongkok, perlawanan itu disebut dengan “Serangan Pisau” ini adalah salah satu kasus perlawanan yang besar dari beberapa insiden Uighur lain dimana perlawanan ini melibatkan senjata yaitu penggunaan pisau. Penggunaan senjata oleh orang Uighur dalam protes dan serangan mereka pada dasarnya tidak ada karena sulitnya mendapatkan persenjataan seperti itu.

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang konflik yang terjadi antara pemerintah komunis Tiongkok dan umat muslim di Xinjiang pada tahun 1950-2014?
2. Bagaimana kebijakan- kebijakan politik pemerintah komunis Tiongkok terhadap umat muslim di Xinjiang tahun 1950-2014?
3. Bagaimana upaya Muslim Uighur di Xinjiang dalam menghadapi kebijakan politik Pemerintah komunis Tiongkok tahun 1950-2014?
4. Bagaimana dampak kebijakan politik pemerintah Tiongkok bagi umat muslim Xinjiang tahun 1950- 2014?

1.3. Tujuan

1. Menjelaskan bagaimana latar belakang konflik yang terjadi antara pemerintah komunis Tiongkok dan umat muslim di Xinjiang pada tahun 1950-2014. Baik dari segi politik, sosial budaya, dan ekonomi.
2. Mendeskripsikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok terhadap umat muslim di Xinjiang tahun 1950-2014
3. Mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Muslim Uighur di Xinjiang dalam menghadapi kebijakan politik Pemerintah komunis Tiongkok tahun 1950-2014
4. Mendeskripsikan bagaimana dampak dari kebijakan politik pemerintah Tiongkok bagi umat muslim Xinjiang tahun 1950- 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian kesejarahan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta konsep keilmuan mengenai Sejarah Asia khususnya tentang konflik yang terjadi di Asia timur tahun 1950-2014. Bagi departemen pendidikan Sejarah dapat digunakan Untuk menambah literatur atau tulisan mengenai sejarah kawasan khususnya Sejarah Asia Bagian Timur yaitu

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenai konflik yang terjadi antara Tiongkok dan umat muslim di xianjiang pada tahun 1950-2014.

2. Secara Praktis, Untuk menambah referensi mengenai materi Sejarah Asia dalam pembelajaran di sekolah terutama saat pembahasan mengenai konflik yang terjadi di Asia pasca Perang Dingin. Termasuk kedalam Kompetensi dasar 3.1 Sejarah peminatan kelas XII yaitu mengevaluasi perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika penelitian dalam penyusunan skripsi peneliti, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini secara garis besar peneliti memaparkan masalah yang akan dikaji. Dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat dan mengkaji tentang kehidupan Umat muslim di Xinjiang dalam menghadapi kebijakan-kebijakan politik pemerintah komunis Tiongkok”. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan memaparkan juga mengenai rumusan dan batasan masalah yang menjadi fokus kajian dari masalah yang diambil, sehingga arah penelitian yang akan dilakukan nantinya menjadi lebih jelas. Adapun tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan peneliti disebutkan pula pada bab ini beserta dengan manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian pustaka, bab ini berisikan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, memaparkan teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan tema yang dikaji yaitu mengenai ” Umat Muslim di Xinjiang dalam meghadapi kebijakan politik pemerintah komunis Tiongkok 1980-2017 (kajian mengenai konflik etnis Uighur)”. Landasan teori tersebut diambil dari berbagai literatur yang relevan, sehingga dapat dijadikan fondasi dan pegangan dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dapat dimasukkan mengenai penelitian terdahulu baik itu berupa skripsi, tesis dan lain-lain untuk menjadi perbandingan bagi peneliti terhadap penelitiannya.

Wulan Safitri, 2019

UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab III Metodologi Penelitian, memaparkan mengenai tahapan-tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, mulai dari heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi dan historiografi.

Bab IV Pembahasan, bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan dan batasan masalah yang telah dibuat pada Bab sebelumnya. Jawaban yang dipaparkan tersebut telah dianalisis oleh penulis dengan mengkaji beberapa sumber yang telah dikritik sebelumnya.

Bab V, Simpulan dan Rekomendasi, bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan dari penelitian secara keseluruhan. Simpulan ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang relevan dengan tema yang diangkat. Sehingga nanti akan memunculkan saran-saran yang direkomendasikan untuk penelitian dan penelitian karya ilmiah selanjutnya, terutama mengenai permasalahan yang mempunyai tema yang sama.